



**TIM PENYUSUNAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN DELI SERDANG 2019-2024**

**Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Deli Serdang**

Tim Pengarah :

Ketua : Sekretaris

**Anggota : Kabid. Perikanan Budidaya
Kabid. Perikanan Tangkap
Kabid. Bina Usaha**

Tim Pelaksana :

Ketua : Kasubbag Keuangan dan Program

Sekretaris : Kasubbag Umum

Anggota : Staff

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang dapat menyusun “Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Tahun 2019-2024” sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang baik yang dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN ataupun sumber-sumber dana lainnya untuk periode 5 (lima) tahun (2019-2024).

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024 ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Deli Serdang, khususnya bagi perkembangan perekonomian pembudidaya ikan, nelayan dan stake holder perikanan dan kelautan lainnya.

Lubuk Pakam, Maret 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUNAN RENSTRA PD	i
SAMBUTAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan	11
2.2.1. Sumber Daya Manusia	12
2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	14
2.3.1. Produksi Perikanan	14
2.3.2. Kinerja Anggaran	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal	21
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal	22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi	31
3.3.1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	31
3.3.2. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	36
3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	42
3.6. Penentuan Isu Strategis	42
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Daerah	44
4.1.1. Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	44
4.1.2. Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	44
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
6.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	49
6.2. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	52
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII. PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Struktur Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	12
Tabel 2. Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	12
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	13
Tabel 4. Tingkat Status ASN dan Non ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	13
Tabel 5. Sarana dan Prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	13
Tabel 6. Pencapaian Kinerja Tahun 2015-2019	15
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	17
Tabel 8. Perkembangan Produksi Perikanan	26
Tabel 9. Identifikasi Permasalahan	29
Tabel 10. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Deli Serdang	38
Tabel 11. Rincian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang	45
Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	46
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	53
Tabel 14. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alur Dokumen Perencanaan Hubungan Antara Keterkaitan	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Deli serdang	11
Gambar 3. Kerangka Kerja dan Rencana Strategis dan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024	48

SAMBUTAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya didalam Dokumen ini disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 12 bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ini disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan Program dan Kegiatan Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran dari semua pihak utamanya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sehingga dokumen Renstra ini dapat tersusun kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Atas Ridho Tuhan yang Maha Kuasa semoga Dokumen ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Lubuk Pakam, Maret 2020
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Deli Serdang



T.M. ZAKI AUFA, S.Sos., M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19730426 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Untuk itu perencanaan maupun pelaksanaannya dilakukan secara terkoneksi dan merupakan satu kesatuan. Tujuan pembangunan sector perikanan dan kelautan adalah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas, pembangunan sarana dan prasarana, serta penataan dan pengembangan kelembagaan dinas kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergitas sumberdaya manusia bersama-sama dengan sumberdaya alam, teknologi dan dalam menggerakkan pembangunan kelautan dan perikanan agar peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan optimal. Sampai saat ini upaya pembangunan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Deli Serdang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah khususnya di bidang produksi ikan.

Oleh sebab itu, masih sangat diperlukan inovasi-inovasi dan kreatifitas yang strategis dalam meningkatkan jumlah produksi ikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Jika dilihat dari karakteristik sosial-ekonomi penduduk sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah nelayan dan petani ikan seperti di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Hampan Perak dan Pantai Labu. Dari segi ekonomi, sector kelautan dan perikanan berdampak terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang, sehingga perlu diarahkan kebijakan pokok pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD penjabaran dari Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang secara komprehensif.

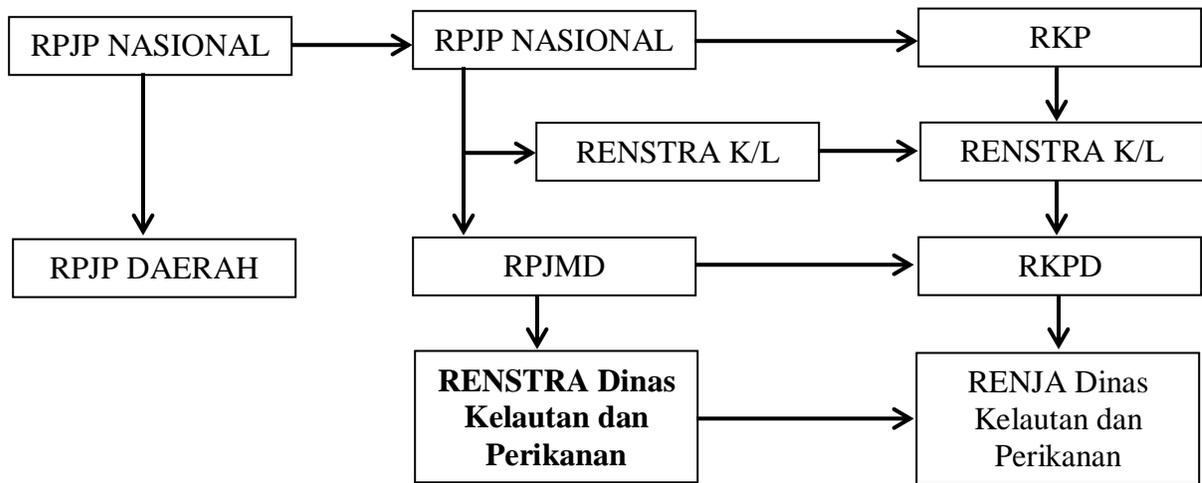
Suatu perencanaan yang komprehensif yaitu yang memuat rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh semua unsure pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang. Perencanaan dimaksud adalah Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Prinsip-prinsip penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu-kesatuan dalam perencanaan pembangunan, dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan juga merupakan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dokumen Renstra ini dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teknografis, partisipatif, politis dan *top down* hasilnya diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dalam penyusunannya mengacu kepada rancangan awal RPJMD 2019-2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renstra, juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1: Bagan Alur Dokumen Perencanaan Hubungan Antara Keterkaitan

Oleh sebab itu, di perlukan suatu dokumen perencanaan yang matang dan terpadu. Dalam Renstra yang dirancang memuat perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Perencanaan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan atau aktivitas masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

7. Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan perikanan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang bagian dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Renstra tahun 2019-2024 ini sebagai berikut:

- a. Pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2019-2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian Arah dan Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2019-2024.
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2019-2024.

1.3.b. Tujuan.

Berdasarkan maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang diatas maka tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Untuk memberikan petunjuk arah pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2014-2019 yang lalu sebagai acuan penyusunan Renstra ini.
- b. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan kinerjanya.
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi bahan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebelumnya.
- d. Penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
- e. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini dijelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini berisi penjelasan tentang peran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, serta penentuan Isu-isu strategis yang sedang dihadapi.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 5 tahun kedepan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuandan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh organisasi dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.

Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi adalah suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 14 Nopember 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris
3. Bidang Perikanan Tangkap
4. Bidang Perikanan Budidaya
5. Bidang Bina Usaha Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang mempunyai Tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan,
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Kelautan dan Perikanan,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang Kelautan dan Perikanan,
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang Kelautan dan Perikanan,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas Membantu kepala dinas dalam melaksanakan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
2. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pembinaan dan pengendalian administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan program.
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan disetiap bidang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu kepala dinas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Perikanan Tangkap. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kegiatan dalam bidang perikanan tangkap.
2. Pembinaan, bimbingan dan pengendalian, tentang teknologi penangkapan dan produksi.
3. Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pangkalan dan tempat pendaratan ikan.
4. Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan wilayah pesisir.

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Perikanan Budidaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kegiatan dalam bidang perikanan budidaya.
2. Pembinaan, bimbingan dan pengendalian, tentang perbenihan dan produksi.
3. Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis teknologi dan sarana budidaya.
4. Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesehatan ikan dan lingkungan.

Bidang Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu kepala dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Bina Usaha Perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

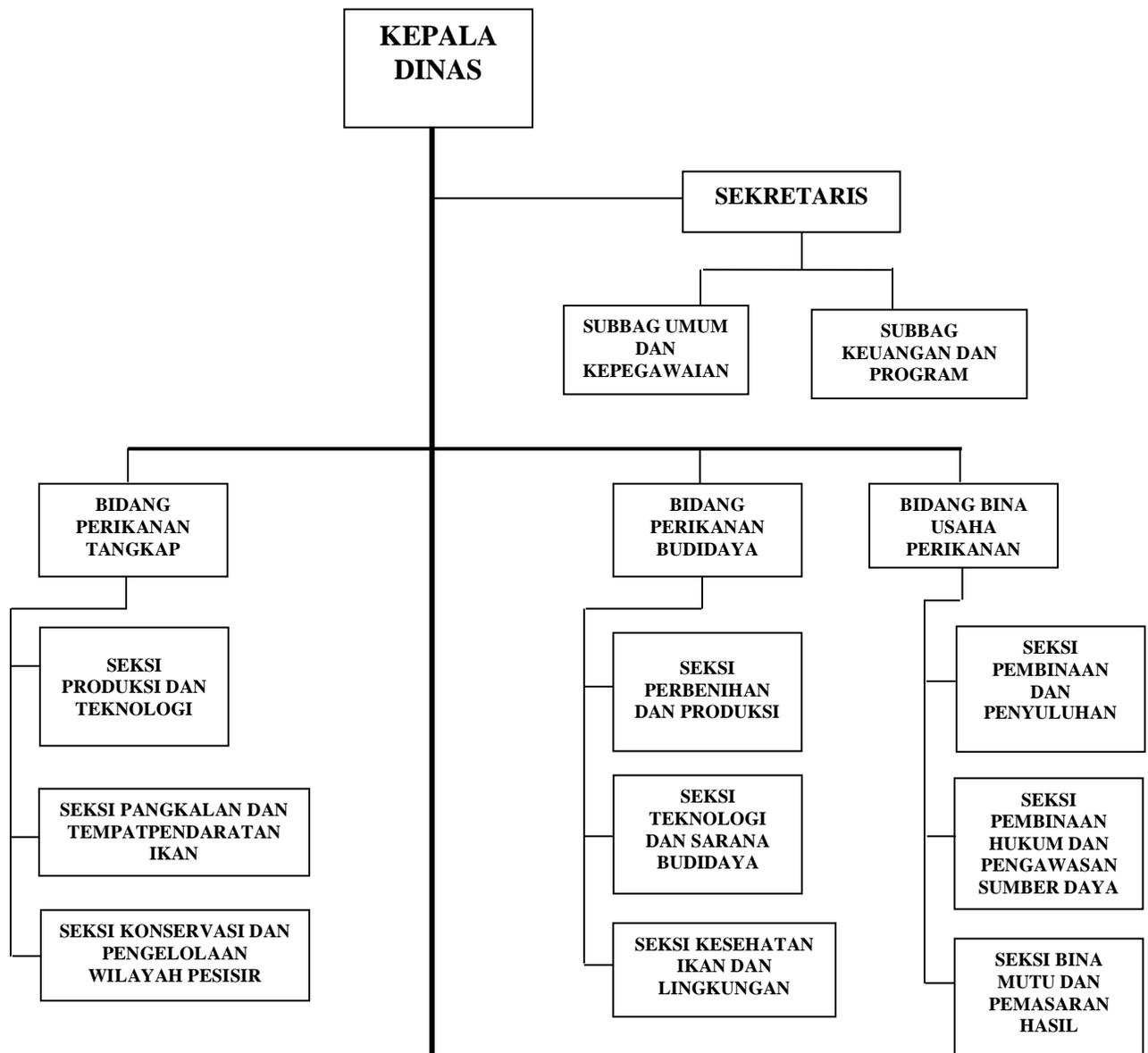
1. Perumusan program kegiatan dalam bidang bina usaha perikanan.
2. Pembinaan, bimbingan dan pengendalian, tentang pembinaan dan penyuluhan.
3. Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan hukum dan pengawasan sumber daya;
4. Pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bina mutu dan pemasaran hasil.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh beberapa pejabat struktural eselon III dan eselon IV yaitu :

1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi 3 (tiga) seksi :
 - a. Kepala Seksi Produksi Dan Teknologi,
 - b. Seksi Pangkalan dan Tempat Pendaratan Ikan,
 - c. Seksi Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir.
3. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Pembenihan dan Produksi;
 - b. Seksi Teknologi dan Sarana Budidaya;
 - c. Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan.
4. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahi 3 seksi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pembinaan Hukum dan Pengawasan Sumber Daya;
 - c. Seksi Bina Mutu dan Pemasaran Hasil.

Adapun bagan struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli

Serdang disajikan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2.Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangibile*). Setiap sumber daya memiliki kegunaan yang lebih spesifik dan memiliki ciri tersendiri, ada yang berguna bagi kehidupan di daerah itu sendiri dan ada yang berguna bagi daerah lain. Sumberdaya yang disusun dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek yang amat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Sumberdaya manusia merupakan kunci yang dapat memastikan kemajuan suatu organisasi. Pada hakikatnya, sumberdaya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun sumberdaya manusia yang dimiliki terdiri dari jabatan dan golongan tingkat pendidikan, status kepegawaian. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Struktur Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Jabatan	Jumlah (org)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	2	1	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	2	2
5.	Kepala Seksi	8	1	9
6.	Staf	7	6	13
Jumlah		18	11	29

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Deli Serdang, 2019

Tabel 2. Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (org)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	2	-
3.	Pembina (IV/a)	2	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	6	2
5.	Penata (III/c)	3	-
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	3
7.	Penata Muda (III/a)	2	3
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	-	1
9.	Pengatur (II/c)	1	-
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-
Jumlah		18	11

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Deli Serdang, 2019

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		Laki	Perempuan
1.	Strata 3 (S3)	-	-
2.	Strata 2 (S2)	4	1
3.	Starata 1 (S1)	12	8
4.	D III	1	-
5.	SMA/SLTA	2	1
J u m l a h		19	10

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Deli Serdang, 2019

Tabel 4. Tingkat Status ASN dan Non ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	
		Laki	Perempuan
1.	ASN	18	11
2.	Non ASN	41	16
J u m l a h		59	27

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Deli Serdang, 2019

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk mencapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien didalam sebuah organisasi tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang dapat berupa bendaan dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Deli Serdang adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut sebagai peralatan pembantu ataupun peralatan utama. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan diuraikan dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Gedung Aula	2	Unit
2.	Gedung Arsip	1	Unit
3.	Ruang Kerja	7	Ruang
4.	Ruang Rapat	1	Ruang
5.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
6.	Kendaraan Roda 2	19	Unit
7.	Wireless Fidelity (WiFi)	3	Unit
8.	Meja Komputer	4	Unit
9.	Printer	35	Unit
10.	LCD Proyektor	3	Unit
11.	Laptop	22	Unit
12.	Kursi Putar	23	Unit
13.	Keramba (Jaring Apung)	1	Unit
14.	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	3	Unit
15.	Mesin Absensi	1	Unit

16.	Meja Rapat	31	Unit
17.	Kursi Rapat	88	Unit
18.	Kursi Lipat Citose	76	Unit
19.	Sofa	2	Unit
20.	AC	17	Unit
21.	Exhause Fan	5	Unit
22.	Aquarium	200	Unit
23.	Kipas Blower	10	Unit
24.	Bak Fibeglass	56	Unit
25.	Alat Pembuat Pelet	1	Unit
26.	CCTV	2	Unit
27.	Bangunan Kamar Mandi	2	Ruang
28.	Sumur dengan Pompa	3	Unit
29.	PC Komputer	7	Unit
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
31.	Website	1	buah
32.	Meja Kerja	55	Unit
33.	Kursi Kerja	1	Unit

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang, 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelayanan adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Selain itu, kinerja pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain. Pengukuran kinerja pelayanan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mengevaluasi dan membenahi sistem yang berjalan dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah. Adapun kinerja pelayanan yang akan diuraikan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari jumlah produksi ikan yang dihasilkan dan kinerja anggaran yang telah dilaksanakan.

2.3.1. Produksi Perikanan

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah

ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya. Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019 untuk sektor produksi perikanan dapat dilihat pada tabel 6 (T-C.23) berikut ini :

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Prangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	52.447,53	57.692,28	64.615,36	71.076,89	79.606,12	51.741,48	58.600,31	66.579,38	64.996,60	78.664,31	98,65	101,57	103,04	91,45	98,82
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.415,66	22.998,47	23.918,41	24.994,74	25.869,55	21.987,40	23.866,05	26.187,41	27.610,59	28.096,87	98,09	103,77	109,49	110,47	108,61
3	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	95.824,88	101.670,35	109.781,87	117.207,39	126.570,80	94.646,33	102.425,12	98.528,08	102.341,97	107.210,83	98,77	100,74	89,75	87,32	84,70
4	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	35	37,5	40	41	42,5	34,25	36,43	37,58	39,72	44,96	97,86	97,15	93,95	96,88	105,79

Tabel 6(T-C.23). Pencapaian Kinerja Tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel diatas, dapat kita lihat pada indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya jika kita lihat dari tahun 2015, Realisasi Capaian dan Rasio Capaiannya terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2016 dan 2017 bahkan ada yang melebihi 100 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan lahan budidaya, pemanfaatan lahan yang sudah lama tidak berfungsi untuk budidaya ikan nila dan udang vanname, serta penambahan lahan mina padi. Namun pada tahun 2018 Perikanan Budidaya mengalami penurunan produksi dari tahun sebelumnya karena kenaikan harga pakan yang sangat signifikan sehingga para pembudidaya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan ikan, kurangnya ketersediaan bibit / benih ikan yang berkualitas serta adanya penurunan areal budidaya perikanan yang beralih fungsi menjadi wilayah pemukiman di Kab. Deli Serdang.

Untuk Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, berdasarkan data capaian pada tabel diatas mulai dari tahun 2015 juga mengalami kenaikan yang melebihi target di tahun 2016 bahkan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan berkurangnya *illegal fishing*, terealisasinya program peningkatan sarana dan prasarana perikanan sehingga meningkatkan jumlah armada dan alat tangkap ikan. Selain itu sejak diberlakukannya PERMEN KP 71 tahun 2016 tentang penggunaan alat tangkap yang lebih selektif sehingga produksi ikan di perairan umum meningkat, serta modernisasi alat tangkap yang ramah lingkungan.

Pada Indikator Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan jika dirata-ratakan capaian Realisasi dan Rasionya dari tahun 2015-2019 diketahui hanya sebesar 92,26 Persen dari Rata-Rata Target yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya teknologi hasil perikanan yang memadai untuk mendukung pengolahan bahan baku ikan dan belum optimalnya kegiatan promosi hasil olahan perikanan serta pelatihan-pelatihan mengenai produk olahan perikanan.

Pada Indikator Tingkat Konsumsi Ikan dapat dilihat persentase capaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih belum mencapai dari angka yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat tidak berbanding lurus dengan jumlah ikan yang masuk dan keluar daerah serta belum meratanya distribusi hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya terutama pada daerah pegunungan. Namun capaian Tingkat Konsumsi Ikan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 44,96 kg/kapita/tahun dengan rasio capaian sebesar 105,79 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah produksi perikanan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi ikan atas dasar nilai gizi yang dikandungnya.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun. Kinerja Anggaran adalah *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk mengukur produksi dan/atau mengembangkan suatu produk atau jasa. Penilaian dan pengukurannya dilakukan dengan cara mengelompokkan rekening anggaran ke dalam suatu kategori yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut.

Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Deli Serdang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga dalam pengukurannya diharapkan menghasilkan sesuatu (keluaran/output) dengan tingkat efisiensi yang seoptimal mungkin. Dana yang tersedia dalam APBD dan DAK (Dana Alokasi Khusus) harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dan juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja anggaran OPD dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan program-program prioritas yang mendukung kualitas kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara rinci program-program tersebut diuraikan dalam tabel tabel 7 (T-C.24) berikut ini :

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	759.037.000	828.325.000	871.715.000	1.377.999.000	1.385.193.000	577.674.319	470.871.596	676.432.976	1.191.621.554	1.176.688.271	76,11	56,85	77,60	86,47	84,95	14,59	20,02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.944.805.000	377.310.000	849.290.000	893.841.000	1.014.235.000	1.142.759.600	220.879.344	702.574.353	806.603.038	701.400.113	58,76	58,54	82,72	90,24	69,16	12,64	27,83
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.000.000	34.000.000	34.000.000	18.900.000	41.600.000	15.950.000	34.000.000	34.000.000	16.800.000	41.504.000	46,91	100	100	88,89	99,77	15,14	41,93
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	104.648.000	99.323.000	97.302.000	160.164.000	161.359.000	44.737.500	91.018.000	95.598.250	147.889.000	138.554.000	42,75	91,64	98,25	92,34	85,87	11,65	31,37

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	28.082.000	103.862.000	152.032.000	0	207.798.000	0	44.405.400	84.498.000	0	114.921.000	0,00	42,75	55,58	0,00	55,30	63,25	29,49
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	654.583.000	132.586.000	103.036.000	83.068.000	0	626.574.000	17.523.000	0	0	0	95,72	13,22	0,00	0,00	0,00	-44,28	-39,44
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	143.477.500	149.484.000	210.530.000	93.083.000	118.223.000	141.112.700	66.844.000	0	81.003.000	0	98,35	44,72	0,00	87,02	0,00	3,25	-30,53
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	689.760.000	0	234.590.000	226.671.000	90.534.000	555.050.000	0	216.690.000	224.853.000	0	80,47	0,00	92,37	99,20	0,00	-12,69	-19,25
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	7.333.738.500	5.352.315.000	3.690.387.000	7.008.294.000	5.511.597.000	6.820.039.000	4.057.065.000	3.089.921.200	4.970.750.078	4.692.694.400	93,00	75,80	83,73	70,93	85,14	2,10	-1,82
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	5.435.414.500	5.147.341.000	5.315.573.000	1.914.341.000	2.978.523.000	5.023.559.500	3.011.156.000	4.757.404.000	1.703.075.500	2.520.225.102,25	92,42	58,50	89,50	88,96	84,61	-2,09	0,34

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	119.697.500	78.110.000	329.260.000	246.387.000	160.861.000	105.125.000	11.372.000	165.589.000	187.272.000	38.023.000	87,83	14,56	50,29	76,01	23,64	45,38	240,07
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	911.117.000	501.024.000	490.535.000	351.576.000	530.837.000	855.195.817	174.685.140	436.766.000	306.076.317	326.630.589	93,86	34,87	89,04	87,06	61,53	-4,89	9,45
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	677.730.000	548.660.000	203.970.000	207.896.000	0	640.680.000	511.830.000	201.100.000	200.241.000	0	94,53	93,29	98,59	96,32	0,00	-35,99	-36,25
JUMLAH	18.836.090.000	13.352.340.000	12.582.220.000	12.582.220.000	12.200.760.000	16.548.457.436	8.711.649.480	10.460.573.779	9.836.184.487	9.750.640.475,25	87,86	65,24	83,14	78,18	79,92	-7,58	-6,82

Tabel 7 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi dan perubahan Renstra 2019 - 2024 yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana dipahami bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Keadaan lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan secara optimal di Kabupaten Deli Serdang. Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “ Analisis SWOT ” (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu lembaga/institusi dalam menemukan potensi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi 5 tahun kedepannya, sehingga dapat diambil sebuah arah kebijakan dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT merupakan analisis keadaan internal ataupun eksternal suatu organisasi yang berikutnya akan diterapkan sebagai dasar untuk merancang taktik dan program kerja. Analisa internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analitik eksternal mencakup elemen peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

Adapun empat unsur *strengths, weakness, oppurtunities, threats* yang terangkum dalam lingkungan internal dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang. Faktor internal akan memberikan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) pada organisasi. Berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal yang telah dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Analisis Lingkungan Internal yang memberikan dorongan kekuatan (*strengths*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Tugas Fungsi dan Kewenangan Yang Jelas sesuai dengan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c. Tersedianya Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- d. Adanya Permintaan Pasar atas Komoditas Kelautan dan Perikanan baik lokal maupun Ekspor
- e. Tersedianya Sumber Daya manusia yang memadai
- f. Adanya Komitmen Pihak Atasan untuk meningkatkan kualitas SDM
- g. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan

2. Kelemahan (*Weakness*)

Analisis Lingkungan Internal yang merupakan kelemahan (*weakness*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

- a. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional dibidang teknis dan manajemen Kelautan dan Perikanan;

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
- d. Masih lemahnya nilai posisi tawar pembudidaya ikan, pengolahan pemasaran dan nelayan;
- e. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap pembudidaya ikan, pengolahan pemasaran dan nelayan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- g. Masih lemahnya pengawasan terhadap perikanan tangkap dan budidaya ikan;

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah analisis faktor yang tidak dimiliki oleh organisasi atau dengan kata lain merupakan sesuatu yang berwujud peluang dan hambatan dari luar, karena berada di luar dan dimiliki oleh organisasi atau sistem lain. Berikut ini adalah faktor eksternal yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang:

1. Peluang

Analisis Lingkungan Eksternal yang memberikan dorongan peluang (*opportunitis*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan panjang pantai ± 65 km.
- b. Tersedianya lahan budi daya baik air tawar seluas 1.198,27 Ha, air payau seluas 1.449,85 Ha dan perairan umum seluas 0,12 Ha.
- c. Kehadiran kemitraan (investor) di bidang budidaya, penangkapan dan agribisnis.
- d. Masih kuatnya rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat khususnya wilayah pesisir.
- e. Perhatian pemerintah yang cukup serius dalam pengadaan alat-alat tangkap perikanan, pengolahan dan pemasaran dan budidaya perikanan dari alokasi APBD dan hibah swasta
- f. Adanya komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan Gizi Masyarakat melalui program GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan);
- g. Terbukanya Pasar regional (lokal) dan Internasional (Eksport);
- h. Adanya dukungan lembaga keuangan;
- i. Tersedianya Sumberdaya Manusia Pembudidaya Ikan, Pengolahan Pemasaran dan nelayan;
- j. Adanya Expo dan Promosi baik ditingkat daerah maupun tingkat Nasional;
- k. Potensi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut cukup besar.

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Analisis Lingkungan Eksternal yang merupakan Tantangan/ancaman (*Threats*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Adanya alih fungsi lahan perikanan menjadi permukiman dan perkebunan seperti di Kecamatan Pesisir
- b. Masih adanya konflik penggunaan air irigasi antara petani sawah dengan pembudidaya ikan;
- c. Adanyapencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai dan wilayah pesisir; (Paluh Putri Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan, Desa Paluh Kurau dan Paluh Manan Kec. Hamparan Perak)
- d. Mahalnya harga pakan ikan, sarana dan prasarana dan Obat-obatan perikanan;
- e. Masih adanya serangan penyakit pada budidaya Udang; (Virus Waitspot Kec. Labuhan Deli, Hamparan Perak dan Pantai Labu)
- f. Masih terjadinya konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan perairan laut. (belum disahkannya peraturan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
- g. Adanya egosentris masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah dalam mendukung program masing-masing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan mencapai tiga perempat dari total luas wilayah, mempunyai kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan 3 (tiga) misi utama, yakni: (1) kedaulatan (*sovereignty*), (2) keberlanjutan (*sustainability*), dan (3) kesejahteraan (*prosperity*).

Untuk mewujudkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, salah satu kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2016 adalah bantuan sarana penangkapan ikan. Bantuan dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Bantuan sarana penangkapan ikan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan dan mutu hasil tangkapan, sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat. Selanjutnya, untuk kelancaran pelaksanaan bantuan perlu ditetapkan Petunjuk Teknis sebagai acuan.

Salah satu sub sektor yang mempunyai peran penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah perikanan tangkap. Sub sektor ini sangat strategis sebagai penyedia bahan pangan bergizi, lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta memberikan kontribusi dalam menghasilkan penerimaan negara.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Bila sektor perikanan dikelola secara serius, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.

Pada umumnya sumber pendapatan para nelayan khususnya hanya mengharapkan hasil tangkapan di laut, mereka tidak memiliki usaha lain selain melaut. Para nelayan bekerja bergantung pada keadaan alam. Jika cuaca sedang tidak mendukung, maka nelayan pun tidak pergi melaut sampai cuaca kembali normal. Selain itu, masalah yang dihadapi nelayan akhir-akhir ini adalah fluktuasi hasil tangkapan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kegiatan nelayan yang terus menerus menggali sumber daya yang ada di laut serta keterbatasan sarana dan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan. Hal inilah yang menjadi kelemahan para nelayan.

Begitu pula halnya yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang wilayah Pantai Timur Sumatera Utara memiliki wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai \pm 65 km meliputi 4 kecamatan yakni: Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan Labuhan Deli dengan fungsi utama sebagai pusat pengolahan perikanan, perkebunan, permukiman, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat jasa pergudangan, pusat pariwisata bahari dan *waterfront city*. Maka dari sinilah dibutuhkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang untuk mendampingi nelayan dalam menggali dan mengembangkan potensinya agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Sejahtera ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang namun belum optimal karena keterbatasan anggaran.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur. Pemerintah melalui Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan kebijakan yang diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan menetapkan beberapa Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
5. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut,
6. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan.
9. Program pengembangan masyarakat dalam pengendalian, penegakan hukum dan pendayagunaan sumber daya perikanan
10. Program pengembangan kapasitas masyarakat terhadap budaya kelautan dan wawasan maritim

Dari program-program tersebut, yang menjadi Program Unggulan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang adalah Program Pengembangan Perikanan budidaya. Program ini menjadi program unggulan dikarenakan sub sektor perikanan budidaya telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan produksi perikanan, penyerapan tenaga kerja, serta konsumsi per kapita masyarakat. Selain, itu program unggulan ini merupakan implementasi program nawacita yang ditekankan oleh pemerintah pusat saat ini yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Adapun untuk melihat perkembangan hasil produksi perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat di lihat pada tabel 8 berikut :

NO	URAIAN	PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
I.	PERIKANAN TANGKAP	21.987,40	23.866,05	26.187,41	27.610,59	28.096,87
1	Penangkapan Di Laut (ton)	21.670,60	23.548,00	25.859,82	27.283,00	27.727,51
2	Penangkapan di Perairan Umum (ton)	316,80	318,05	327,59	327,59	369,36

NO	URAIAN	PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
II.	PERIKANAN BUDIDAYA	51.741,48	58.600,31	66.579,38	64.996,60	78.664,31
1.	Budidaya Laut (ton)	18,85	18,14	50,75	15,00	42,30
2.	Budidaya Air Payau (ton)	5.300,13	6.122,07	6.210,29	8.222,80	9.788,10
3.	Budidaya Air Tawar (ton)	46.352,13	52.358,40	60.215,65	56.704,00	68.823,72
4.	Budidaya di Perairan Umum	70,37	101,70	102,69	54,80	10,19
III.	TOTAL PRODUKSI (TON)	73.728,88	82.466,36	92.766,79	92.607,19	106.761,18
IV.	JUMLAH IKAN YANG KELUAR DAERAH (TON)	11.884,25	14.366,12	23.825,19	14.078,89	10.880,50
V.	JUMLAH IKAN YANG MASUK KE PASAR LOKAL DARI LUAR DAERAH (TON)	25.035,48	26.170,33	21.265,23	20.351,89	7.744,41
VI.	JUMLAH IKAN DI PASAR LOKAL (TON)	86.880,11	94.270,57	90.206,83	98.880,19	103.630,07
VII.	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	2.029.308	2.069.894	1.920.315	1.991.455	1.844.104
VIII.	KONSUMSI PERKAPITA (kg/Jiwa/Tahun)	34,25	36,43	37,58	39,72	44,96

Tabel 8. Perkembangan Produksi Perikanan

Dilihat dari perkembangan produksi perikanan, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir produksi perikanan budidaya masih mendominasi produksi perikanan tangkap dimana jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2019 sebesar 78.664,31 ton, sedangkan untuk produksi perikanan tangkap sebesar 28.096,87. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil produksi ikan yang dihasilkan. Dalam bidang penyerapan tenaga kerja, sub sektor perikanan budidaya pada kurun waktu setiap tahun dapat menyumbang penyerapan tenaga kerja dan sekaligus membuka lapangan kerja. Setidak-tidaknya hasil produksi budidaya bisa dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga.

Sedangkan dilihat dari konsumsi per kapita masyarakat terhadap komoditi ikan, setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,72 kg/kapita/tahun pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 44,96 kg/kapita per tahun. Walaupun setiap tahunnya tingkat konsumsi meningkat, namun masih terdapat kelemahan yaitu sumberdaya nelayan masih sangat terbatas khususnya dalam memahami zona-zona eksklusif wilayah laut Kabupaten Deli Serdang. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya informasi, sehingga membutuhkan perubahan dan strategi khusus dalam mengatasi kebutaan tersebut. Selain itu, bantuan dan petunjuk teknis penangkapan ikan belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan pendamping teknis dan anggaran. Pemahaman terhadap penggunaan alat-alat tangkap yang diberikan pemerintah maupun swasta melalui APBD maupun hibah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dengan memberikan pendidikan, pembinaan dan pelatihan. Selanjutnya strategi dan pengelolaan jangka panjang perlu untuk dirumuskan berdasarkan skala prioritas.

Strategi khusus yang dibutuhkan dalam memerangi permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan nelayan dalam berbagai pelatihan seperti pelatihan pemetaan wilayah pesisir, pemberdayaan nelayan dan pemanfaatan alat tangkap. Kegiatan tersebut sangat dibutuhkan dan sangat membantu para nelayan. Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut meliputi pengadaan bantuan alat tangkap dan pengadaan sarana perikanan tangkap. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka usaha para nelayan dalam penangkapan ikan menjadi sangat terbantu. Selain itu, yang menjadi perhatian khusus adalah ketidakmampuan nelayan secara maksimal dalam mengelola dana APBD untuk pengadaan barang sehingga perlu dukungan dan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan agar target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang tercapai.

Namun demikian, dari analisis internal yang telah dilakukan masih ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja yaitu seperti yang dijelaskan dalam tabel 9 berikut ini:

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pakan ikan	Harga pakan ikan yang tinggi, (<i>seperti harga pakan F01 tahun 2018 sebesar Rp. 13.500, tahun 2019 sebesar 15.300</i>)	Bahannya tergantung dari industri yang sebagian besar bahannya masih di import
2.	Sumber daya kelautan dan perikanan	Pengelolaannya belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sarana dan prasarana yang masih bersifat tradisional • Kurangnya kemampuan para pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan yang berbasis teknologi
3.	Produksi perikanan tangkap di perairan umum	Produksinya masih rendah	Ekosistem perairan umum banyak yang rusak karena tercemar limbah
4.	Penggunaan alat tangkap ikan.	Masih didapati nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan	Nelayan merasa hasil tangkapannya lebih menguntungkan secara financial dengan menggunakan alat tangkap tersebut

Tabel 9 (T-B.35) Identifikasi Permasalahan

Selain dari permasalahan yang disebutkan diatas, di sisi lain Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki potensi sumberdaya alam yang potensial dan dapat dikembangkan dilihat dari letak geografis pantai yang membentang sepanjang \pm 65 km. Disamping itu, juga zona ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya seperti: zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap dan zona pelabuhan. Dalam hal penentuan zona-zona ini dirumuskan dalam pembahasan rencana tata ruang dan rencana wilayah daerah untuk menentukan kawasan-kawasan terlarang perikanan tangkap. Zona kabupaten Deli Serdang berada pada wilayah pantai timur. Dimana potensi pengembangan di wilayah Timur Sumatera Utara adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan.

Hasil perikanan hanya dihasilkan didaerah-daerah yang berhubungan dengan wilayah perairan, baik perairan laut maupun perairan darat. Produksi yang dilakukan oleh nelayan dan petani ikan terpencar di daerah-daerah dimana perairan, tanah dan iklimnya memberi kemungkinan cocok untuk berproduksi dan kadang-kadang lokasinya sangat jauh dari pusat-pusat konsumsi atau pasar. Dengan tidak dapat diproduksi di sembarang tempat, maka diperlukan juga aktifitas pengangkutan dan pendistribusian yang tepat untuk mengantarkan produk perikanan dari daerah produsen ke daerah konsumen. Jumlah dan kualitas dari hasil perikanan tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Ada tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan baik dan ada pula

tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan merosot, karena sangat tergantung pada keadaan cuaca serta kondisi perairan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 adalah

“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinnekaan.”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024 adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (*good & clean governance*), berwibawa dan bertanggung jawab.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada **misi ke dua** yaitu meningkatkan

kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Adapun misi ke dua ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dengan sasaran meningkatnya produktivitas sektor perikanan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan KKP disusun untuk mencapai misi pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah:

1. Agenda/Nawa Cita ke-1:

Sub Agenda: Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu;
- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut

- sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional;
- c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat;
 - d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
 - f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan.

2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan
- b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap; dan
- d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6:

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7:

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi;
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi; dan
- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;
- b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut;
- d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari; dan
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Uraian tersebut diatas menjadi menjadi dasar dalam menyusun kerangka pembangunan kelautan dan perikanan di SUMATERA UTARA.

3.3.2. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

. Perumusan visi pembangunan SUMATERA UTARA merupakan hasil analisis terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki oleh Provinsi SUMATERA UTARA. Visi yang dicanangkan merupakan panduan dalam menetapkan tujuan dan sasaran program pembangunan di SUMATERA UTARA dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi SUMATERA UTARA 2018- 2023 adalah

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Pernyataan visi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut :

1. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produk perikanan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan menyehatkan.

2. Kemampuan meningkatkan produksi ikan melalui kegiatan : penangkapan yang selektif dan efisien dan penerapan cara budidaya/pembenihan ikan yang baik (CBIB/CPIB).
3. Kemampuan untuk menjamin pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui fasilitasi hibah dan bansos.
4. Kemampuan untuk membangun sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan yang bersumber daya dari sumberdaya kelautan dan perikanan.
6. Kemampuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dibidang kelautan dan perikanan.
7. Kemampuan memperkuat perekonomian domestic berbasis produk unggulan kelautan dan perikanan.
8. Kemampuan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil secara efektif dan optimal.
9. Kemampuan penerapan teknologi dibidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Ukuran Aman ditunjukkan oleh :

1. Ketersediaan bahan pangan dari produk perikanan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan menyegatkan.
2. Ketersediaan produk perikanan melalui kegiatan: penangkapan yang selektif dan efisien dan penerapan cara budidaya/ pembenihan ikan yang baik (CBIB/CPIB).
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui fasilitas hibah dan bansos
4. Ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
5. Tersedianya penerimaan dan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumberdaya kelautan dan perikanan.

6. Terciptanya Iklim investasi yang kondusif dibidang kelautan dan perikanan.
7. Terciptanya perekonomian domestik berbasis produk unggulan kelautan dan perikanan.
8. Termanfaatkannya potensi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil secara efektif dan optimal.
9. Keberadaan peraturan perundang – undangan dibidang kelautan dan perikanan.

Ukuran bermartabat ditunjukkan oleh :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia perikanan yang bermartabat dalam penyediaan bahan pangan bersumber dari produk perikanan yang cukup, bermutu dan menyehatkan serta harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia perikanan yang bermartabat dalam penerapan teknologi kelautan dan perikanan yang berkarakter, cerdas, berdaya saing dan mandiri.
3. Mewujudkan sumberdaya manusia perikanan yang bermartabat dalam pengelolaan bersumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi SUMATERA UTARA 2018-2023, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2018-2023, merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2005-2025. Orientasi difokuskan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

Kebijakan pembangunan daerah yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan adalah pada misi ke-1 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pembagian wilayah menurut kondisi fasilitas dan daya dukung lahan terhadap pengembangan dan pembangunan dapat dilihat dalam tata ruang wilayah. Dalam tata ruang wilayah ini dapat dilihat pembagian daerah-daerah yang ada di Deli Serdang sesuai dengan karakteristik dan daya dukung lahan maupun fasilitas untuk dikembangkan menjadi suatu daerah tertentu. Rencana-rencana yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah ini merupakan sebuah produk yang harus dipatuhi oleh setiap stakeholder yang ingin memajukan Deli Serdang. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan Kabupaten), rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang

wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Perencanaan tata ruang adalah ekspresi geografis cerminan dari lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Salah satunya adalah pengembangan wilayah pesisir dan pantai. Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar mengingat wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan pantai dengan panjang garis pantai 65 Km, yang dapat dikembangkan untuk berbagai komoditi perikanan laut, pertambakan, budidaya laut dan budidaya air tawar. Sehingga aspek-aspek pengembangan tataruang tersebut tidak terlepas dari pengaruh aspek geografis, demografis, hidrologi dan iklim.

3.4.1. Letak Geografis

Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kondisi wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak diantara 2°57" LU- 3°16" LS dan 98°33 BT - 99°27 BT merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² (249,772 Ha) atau merupakan 3,34% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Ketinggian mencapai 0 – 1000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Dataran Pantai, meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu), dengan luas 65.690 ha (26,36% dari luas kab. deli serdang). Jumlah Desa sebanyak 380 Desa/Kelurahan. Salahsatu sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang adalah sumber daya kelautan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3.4.2. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri atas permukaan atas air permukaan yaitu sungai, rawa, dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peaturan Menteri PU Nomor 11.A/PRT/M/2006 Tentang Sungai dan Satuan wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Deli Serdang berdasarkan lintas wilayahnya termasuk pada satuan wilayah sungai (WS) Wampu-Besitang dan WS Strategis Nasional Belawan-Ular-Padang. WS strategis Nasional mencakup 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) Belawan, DAS Deli, DAS Percut, DAS Batang Kuis, DAS Belumai

dan DAS Ular dengan luas areal ± 378.841 ha, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka dengan hulunya berada di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo.

Tabel. 10. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Deli Serdang

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Sub DAS	Luas Areal Km ²	Keterangan
1.	Belawan	a. Belawan Hulu b. Belawan hilir c. Karang gading	760,03	Sebahagian melintasi wilayah Kota Medan dan Kabupaten Langkat
2.	Deli	a. Petani b. Deli c. Babura d. Bekala e. Sei Sikaming f. Paluh Besar	481,62	Sebahagian melintasi wilayah Kota Medan
3.	Percut	a. Percut hulu b. Percut hilir	514,20	
4.	Belumai	a. Belumai b. Serdang	754,60	
5.	Ular	a. Bah Karai b. Buaya c. Ular d. Karang e. Perbaungan	1.277,96	Sebahagian melintasi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

Sumber: Bappeda, Kab. Deli Serdang 2018

Pada umumnya sub Daerah Aliran Sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi ketahanan pangan. Rawa di kawasan Mebidangro terdapat dua baian Utara kawasan yaitu di wilayah Kecamatan Hampan Perak, Pantai Labu, Labuhan Deli dan Percut Sei Tuan. Wilayah kabupaten Deli Serdang memiliki potensi air tanah yang termasuk bagian dari cekungan air tanah (CAT) Medan yang luas dan membentang dari Langkat hingga Labuhanbatu, dari Medan hingga Pematang Siantar. Namun demikian masih terdapat permasalahan DAS di Kabupaten Deli Serdang disebabkan terjadinya erosi tanah yaitu di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dampak dari erosi tanah menyebabkan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai Percut karena telah banyak mengalami perubahan lingkungan terutama perubahan tata guna lahan di daerah hulu yang berdampak pada berkurangnya kemampuan Sungai Percut dalam menampung aliran air terutama pada saat musim hujan sehingga akan menyebabkan banjir. Pendangkalan pada muara Sungai Percut mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat nelayan di daerah Sungai Percut dan sekitarnya seperti terhalangnya jalur keluar masuknya kapal nelayan yang akan melaut dan meningkatnya daerah genangan air akibat naiknya muka air di sungai. Maka

langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pengelolaan terhadap Daerah Aliran Sungai Percut tersebut. Besarnya erosi yang terjadi di Daerah Aliran Sungai Percut adalah 21,50 ton/ha/thn serta besarnya sedimen 68.346,59 ton/thn dan hal ini telah melampaui nilai toleransi sedimentasi untuk Sungai Percut yaitu 26.426, 36 ton/tahun.

Oleh sebab itu, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan membuat zona proteksi pada daerah rawan erosi (kritis), melaksanakan upaya konservasi secara agronomis dan mekanis, normalisasi sungai dan penataan lahan sempadan sungai, serta melaksanakan kebijakan pengelolaan DAS Percut secara terpadu dan berkelanjutan oleh semua pihak yang terkait. Disamping itu, juga memberikan sanksi hukum yang tegas dan transparan bagi setiap pelanggaran yang ada dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, mengingat pemanfaatan sungai ini mendukung perekonomian masyarakat dengan untuk budidaya perikanan.

3.4.3. Demografi

Pemahaman tentang jumlah, struktur, dan pertumbuhan serta distribusi penduduk sangat menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Kondisi kependudukan akan mempengaruhi berbagai kebijaksanaan pembangunan dari berbagai sektor-sektor pelayanan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang terus tumbuh secara relatif cepat dan hal ini akan membawa perubahan pada sistem pelayanan pemerintah secara keseluruhan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tercatat sebanyak 1.844.104 jiwa (*sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019*).

3.4.4. Iklim

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Wilayah Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni hingga September arus angin yang bertiup tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan November hingga Maret arus angin banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Menurut catatan stasiun klimatologi

Sampai selama 5 tahun terakhir, curah hujan relatif cukup tinggi yaitu rata-rata 2.300 mm per tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 202 hari per tahun.

Maka dari itu perlu perhatian khusus terhadap perubahan iklim yang terjadi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang dimiliki Kabupaten Deli Serdang. Kawasan peruntukan tersebut meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dibidang perikanan agar mendukung terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang antara lain :

1. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri
2. Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang
3. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata, kawasan permukiman, serta kawasan perdagangan, dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
4. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap di bagian pesisir (Kecamatan Pantai Labu, Percut Sei Tuan, Labuhan Deli dan Kecamatan Hampan Perak) melalui pengembangan tempat pendaratan ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta mendorong pengembangan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang yang difasilitasi oleh adanya industri pengolahan perikanan, sedangkan pengembangan perikanan air tawar lainnya dikembangkan menyebar sesuai potensi yang ada.
5. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan
6. Mengembangkan kawasan budidaya meliputi permukiman, pelabuhan, pariwisata, industri, perikanan dsb secara terbatas serta terkendali (dalam artian tidak mengubah fungsi kawasan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan dan lestari).

7. Pengembangan kawasan budidaya memperhatikan tingkat perkembangan (percepatan/perlambatan) setiap fungsi pemanfaatan ruang dengan prioritas.
8. Proporsi terbesar pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan perkembangan tinggi.
9. Pengembangan kawasan budidaya memperhatikan dominasi kegiatan setiap kecamatan dengan prioritas (proporsi terbesar) pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan dominasi tinggi.
10. Pengembangan permukiman dikembangkan dengan jumlah kepadatan rumah > 25 unit/Ha untuk kepadatan tinggi, 15-25 unit/Ha untuk kepadatan sedang, dan < 15 unit/Ha untuk kepadatan rendah.
11. Pengembangan budidaya pertanian dengan pemanfaatan lahan 5 tenaga kerja/Ha.
12. Pengembangan budidaya tambak (perikanan darat) dengan pemanfaatan lahan 10 tenaga kerja/Ha.

Pemanfaatan ruang kawasan perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Deli Serdang adalah kawasan perikanan darat, yaitu kolam air tenang, kolam air deras, sawah/mina padi dan sungai serta perikanan laut. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perikanan darat adalah kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- Kawasan dengan kemiringan < 8%.
- Persediaan air cukup.
- Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan perikanan darat serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal.

Berdasarkan kriteria diatas maka potensi pengembangan budidaya perikanan darat di Kabupaten Deli Serdang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan, antara lain : Kecamatan Pantai Labu, Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Hampan Perak, Namorambe, Biru-biru, Patumbak, Tanjung Morawa, Kutalimbaru, Pagar Merbau, Sunggal, Sibolangit, Pancur Batu, STM Hilir, dan Kecamatan Beringin.

Pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perikanan tangkap (perikanan laut) terletak di wilayah pesisir pantai Kabupaten Deli Serdang yang meliputi Kecamatan Labuhan Deli, Hampan Perak, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu. Sedangkan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Percut Sei Tuan.

3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai *“rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rancangan dan/atau program.”*

Sedangkan UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses sistematis yang menjamin dipertimbangkannya unsur-unsur pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Penekanan dalam proses sistematis tersebut adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Sebagai sebuah proses sistematis, implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan membutuhkan tahapan aktivitas yang terstruktur, yakni rangkaian kegiatan yang bersifat sequence dengan pendekatan utama konsultatif partisipatif. Proses tersebut akan dibangun komunikasi dan keterkaitan serta ketergantungan antar pihak terhadap isu-isu berkelanjutan suatu kebijakan, rencana dan program (KRP) tertentu.

3.6. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan. Manakala hal tersebut tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara serius, sistematis dan komprehensif.

Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Tingginya harga pakan ikan
- b) Masih rendahnya produksi perikanan tangkap di perairan umum
- c) Masih terbatasnya sarana dan sumber daya air yang sesuai untuk pembudidayaan ikan air tawar
- d) Fungsi kelembagaan kelompok masyarakat perikanan perlu ditingkatkan
- e) Masih terbatasnya penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Daerah.

4.1.1. Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai atau dihasilkan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang bersifat idealistik, yang berisikan nilai-nilai dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik 5 tahun kedepan yaitu tahun 2019-2024. Tujuan rencana strategis yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB;
2. Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel.

4.1.2. Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik serta terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas sektor perikanan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah.

Secara terperinci tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Persentase PDRB sektor perikanan			1,29 %	1,30%	1,31%	1,32%	1,33%
		Meningkatnya produktivitas sektor perikanan	- Jumlah Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan	198.039,85 Ton	201.278,04 Ton	204.665,74 Ton	208.212,86 Ton	211.934,12 Ton
Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin
			- Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin

Tabel 11 (T-C.25) Rincian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

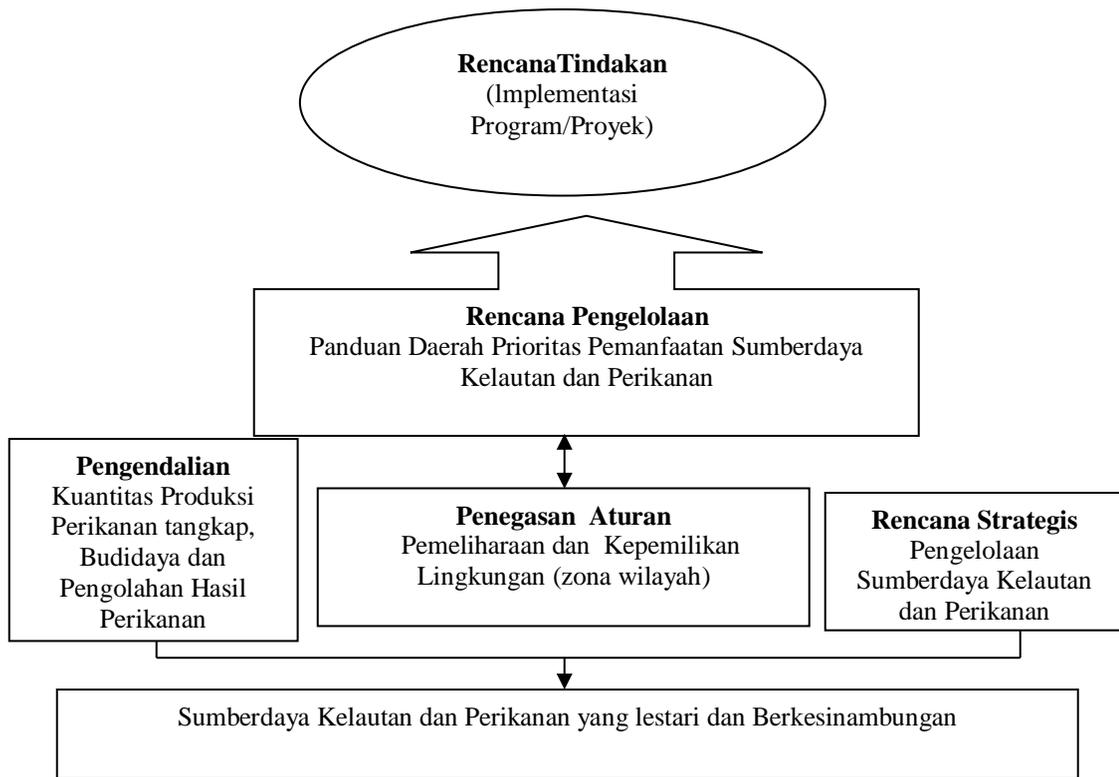
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Adapun Strategi dan kebijakan yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

VISI : “ Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.”			
Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi usaha masyarakat pesisir di wilayah pantai dan pesisir. 2. Mengurangi perilaku menyimpang dalam mengelola sumberdaya laut seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut, 3. Meningkatkan penghasilan nelayan seperti usaha simpan pinjam nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan sarana prasarana budidaya serta pemberdayaan pembudidaya ikan. 2. Pemberdayaan nelayan kecil melalui penyediaan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, perbaikan sarana prasarana TPI, pembinaan dan pelatihan serta perlindungan nelayan kecil;

VISI :			
“ Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan.”			
<i>Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		(Koperasi) dan pemberdayaan masyarakat nelayan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemanfaat sumberdaya perikanan dan kelautan 5. Melakukan sinergitas antar pihak pengguna sumberdaya perikanan seperti kepala dinas, bupati dan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam dengan mendukung semua program pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Deli Serdang	3. Pengembangan masyarakat perikanan melalui usaha peningkatan nilai tambah produk dan daya saing perikanan non konsumsi (ikan hias); 4. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Tabel 12 (T-C.26). Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berikut gambar visualisasi rangkaian kerangka strategi dan kebijakan pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Deli Serdang. Dari visualisasi ini terlihat jelas bahwa strategi dan kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan. Dengan menerapkan strategi dan kebijakan ini merupakan landasan pembangunan Deli Serdang menuju masa depan yang diinginkan.



Gambar 3. Kerangka Kerja dan Rencana Strategis dan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Upaya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, maka perlu menetapkan Program Pembangunan dan Kegiatan 5 (lima) tahun ke depan (2019-2024) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

Kegiatan-kegiatan :

1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
4. Rehabilitasi Sedang /Berat Sarana dan Prasarana Perikanan
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Perikanan
6. Pengadaan dan Pendistribusian Pakan Ikan Kepada Masyarakat dan Balai Benih Ikan
7. Pengadaan dan Pendistribusian Benih Ikan kepada Masyarakat
8. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Budidaya
9. Penerapan Inovasi dan Teknologi Budidaya Perikanan

B. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan-kegiatan:

1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan
5. Pengadaan Prasarana Perikanan Tangkap
6. Pengadaan Alat Tangkap Ikan
7. Penerapan Inovasi dan Teknologi Penangkapan
8. Pembangunan Tempat Tambat /Tangkahan Sampan Nelayan

9. Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan
10. Pembangunan Docking Sampan Nelayan
11. Pembangunan Rumah Ikan (Rumpon)

C. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan-kegiatan :

1. Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Promosi Hasil Pengolahan Perikanan
3. Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

D. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan-kegiatan :

1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

E. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Kegiatan-kegiatan :

1. Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

F. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan-kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Kegiatan-kegiatan :

1. Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
2. Peringatan Hari Nusantara

G. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

Kegiatan-kegiatan :

1. Pelestarian Tradisi dan Budaya Maritim

H. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Kegiatan-kegiatan :

1. Pekan Nasional (PENAS)

J. Program Pengembangan Masyarakat dalam Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pendayagunaan

Sumberdaya Perikanan

Kegiatan-kegiatan :

1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumberdaya Perikanan
2. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya Perikanan

K. Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat terhadap Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim

Kegiatan-kegiatan :

1. Peringatan Hari Nusantara
2. Pelestarian Tradisi dan Budaya Maritim
3. Pekan Nasional (PENAS)

L. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
15. Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran

M. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pengadaan peralatan gedung/kantor
5. Pengadaan Mebeleur
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Berkala / Rutin Mebeleur
11. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan
12. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor
13. Rehabilitasi /Renovasi Taman

N. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

O. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2. Forum OPD
3. Penyusunan statistik perikanan

6.2. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Pejabaran dari program-program yang telah diuraikan pada point 5.1. akan dituangkan dalam pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaannya dalam bentuk tabel rencana program dan kegiatan 5 tahunan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel 13 (T-C.27) berikut ini

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Deli Serdang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi								
							Target	Rp.	Target	Rp.									
Meningkatkan Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Jumlah Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan	20	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	64.996,60 Ton	65.776,56 Ton	8.177.670.500	66.697,43 Ton	8.593.338.000	67.764,59 Ton	9.147.878.000	68.984,35 Ton	9.864.290.500	70.364,04 Ton	10.581.719.000	339.586,97 Ton	46.364.896.000	KAB. DELI SERDANG
			20.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah calon induk ikan unggul yang dibutuhkan BBI	438 unit	10 paket	89.670.500	50 paket	245.000.000	65 paket	323.878.000	80 paket	473.290.500	95 paket	565.719.000	300 paket	1.697.558.000	
			20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan	55 unit	140 org	650.000.000	200 org	730.000.000	220 org	830.000.000	240 org	955.000.000	260 org	1.185.000.000	1.060 org	4.350.000.000	
			20.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	-	9 unit	4.400.000.000	12 unit	3.556.338.000	13 unit	3.600.000.000	17 unit	3.710.000.000	19 unit	3.800.000.000	70 unit	19.066.338.000	
			20.07	Rehabilitasi Sedang /Berat Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana yang direhab	-	3 unit	685.000.000	4 unit	825.000.000	4 unit	900.000.000	5 unit	960.000.000	5 unit	1.000.000.000	21 unit	4.370.000.000	
			20.08	Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Perikanan	Luas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan	-	600 m ²	823.000.000	650 m ²	960.000.000	700 m ²	983.000.000	800 m ²	1.030.000.000	830 m ²	1.100.000.000	3.580 m ²	4.896.000.000	
			20.09	Pengadaan dan Pendistribusian Pakan Ikan Kepada Masyarakat dan Balai Benih Ikan	Jumlah pakan ikan yang didistribusikan ke masyarakat dan Balai Benih Ikan	-	16.000 kg	590.000.000	20.000 kg	765.000.000	23.000 kg	850.000.000	26.000 kg	960.000.000	28.000 kg	1.000.000.000	113.000 kg	4.165.000.000	
			20.10	Pengadaan dan Pendistribusian Benih Ikan kepada Masyarakat	Jumlah benih ikan yang didistribusikan ke masyarakat	-	20.000 ekor	160.000.000	200.000 ekor	265.000.000	250.000 ekor	390.000.000	350.000 ekor	460.000.000	450.000 ekor	560.000.000	1.270.000 ekor	1.835.000.000	
			20.11	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Budidaya	Jumlah perlengkapan dan peralatan budidaya yang dibutuhkan	-	105 unit	730.000.000	120 unit	1.050.000.000	125 unit	1.130.000.000	130 unit	1.220.000.000	135 unit	1.261.000.000	615 unit	5.391.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi									
							Target	Rp.	Target	Rp.										
			20.12	Penerapan Inovasi dan Teknologi Budidaya Perikanan	Jumlah inovasi dan teknologi yang diterapkan	-	8 unit	50.000.000	16 unit	197.000.000	14 unit	141.000.000	10 unit	96.000.000	12 unit	110.000.000	60 unit	594.000.000	KAB. DELI SERDANG	
			21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	27.610,59 Ton	27.886,70 Ton	3.577.731.000	28.165,56 Ton	4.659.039.000	28.447,22 Ton	5.596.349.000	28.731,69 Ton	6.165.181.500	29.019,01 Ton	6.744.392.000	142.250,18 Ton	26.742.692.500		
			21.01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mendapat pelatihan /pendampingan	1.830 unit	200 org	382.000.000	200 org	410.000.000	200 org	440.000.000	200 org	480.000.000	200 org	510.000.000	1.000 org	2.222.000.000		
			21.02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah pusat pendaratan ikan yang dibangun	-	1 unit	550.000.000	1 unit	775.000.000	1 unit	835.000.000	1 unit	880.000.000	1 unit	920.000.000	5 unit	3.960.000.000		
			21.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Luas pusat pendaratan ikan yang terpelihara	12 bh	1.000 m ²	250.000.000	1.000 m ²	320.000.000	1.000 m ²	480.000.000	800 m ²	465.000.000	800 m ²	475.000.000	4.600 m ²	1.990.000.000		
			21.04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Jumlah tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	-	3 unit	450.000.000	3 unit	600.000.000	3 unit	735.000.000	3 unit	860.000.000	3 unit	950.000.000	15 unit	3.595.000.000		
			21.09	Pengadaan Prasarana perikanan tangkap	Jumlah sampan yang disalurkan	-	11 unit	180.000.000	20 unit	360.000.000	20 unit	510.000.000	20 unit	665.000.000	20 unit	750.000.000	91 unit	2.465.000.000		
			21.10	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Jumlah alat tangkap ikan yang disalurkan	-	10 unit	391.000.000	15 unit	570.000.000	20 unit	740.000.000	20 unit	790.000.000	20 unit	845.000.000	85 unit	3.336.000.000		
			21.11	Penerapan Inovasi dan Teknologi Penangkapan	Jumlah inovasi dan teknologi penangkapan ikan yang diterapkan	-	32 unit	130.000.000	30 unit	180.000.000	30 unit	280.000.000	25 unit	265.000.000	30 unit	350.000.000	147 unit	1.205.000.000		
			21.12	Pembangunan Tempat Tambat /Tangkahan Sampan Nelayan	Jumlah tempat tambat sampan /tangkah yang dibangun	-	1 unit	390.000.000	2 unit	500.000.000	2 unit	530.000.000	2 unit	570.000.000	2 unit	610.000.000	9 unit	2.600.000.000		
			21.13	Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan	Jumlah mesin dan cool box yang disalurkan	-	200 unit	300.000.000	200 unit	335.000.000	200 unit	370.000.000	200 unit	395.000.000	200 unit	450.000.000	1.000 unit	1.850.000.000		
			21.14	Pembangunan Docking Sampan Nelayan	Jumlah Docking sampan yang dibangun	-	2 unit	417.000.000	2 unit	450.000.000	2 unit	487.310.000	2 unit	570.000.000	2 unit	634.000.000	10 unit	2.558.310.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			21.15	Pembangunan Rumah Ikan (Rumpon)	Jumlah rumah ikan (rumpon) yang dibangun	-	1 unit	137.731.000	1 unit	159.039.000	1 unit	189.039.000	1 unit	225.181.500	1 unit	250.392.000	5 unit	961.382.500	
			23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	3.461,78 Ton	3.496,40 Ton	669.547.000	3.534,86 Ton	812.743.500	3.573,74 Ton	941.693.500	3.616,63 Ton	1.025.662.000	3.670,88 Ton	1.157.012.000	17.892,51 Ton	4.606.658.000	
					Jumlah pemasaran hasil perikanan	98.880,19 Ton	100.880,19 Ton		102.880,19 Ton		104.880,19 Ton		106.880,19 Ton		108.880,19 Ton		524.400,95 Ton		
			23.03	Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan /pemasaran hasil perikanan yang mendapat pembinaan /pelatihan	-	140 org	175.000.000	220 org	245.000.000	240 org	300.000.000	260 org	337.000.000	280 org	375.000.000	1.140 org	1.432.000.000	
			23.04	Promosi Hasil Pengolahan Perikanan	Jumlah kegiatan lomba masak serba ikan yang dilaksanakan /diikuti	-	2 keg	380.000.000	2 keg	400.000.000	2 keg	425.000.000	2 keg	452.000.000	2 keg	497.012.000	10 keg	2.154.012.000	
			23.05	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah prasarana dan sarana yang disalurkan	-	12 unit	114.547.000	14 unit	167.743.500	16 unit	216.693.500	16 unit	236.662.000	16 unit	285.000.000	74 unit	1.020.646.000	
			15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah anggota kelompok budidaya dan pelaku usaha pengolahan /pemasaran hasil perikanan yang meningkat taraf kehidupannya	-	120 org	153.331.500	-	0	-	0	-	0	-	0	120 org	153.331.500	
			15.01	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah anggota kelompok budidaya dan pelaku usaha pengolahan /pemasaran hasil perikanan yang mendapat pelatihan	-	120 org	153.331.500	-	0	-	0	-	0	-	0	120 org	153.331.500	KAB. DELI SERDANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			16	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Jumlah masyarakat yang peduli terhadap sumberdaya kelautan semakin meningkat		100 org	122.665.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100 org	122.665.000	KAB. DELI SERDANG
			16.03	Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Jumlah anggota kelompok pokmaswas yang dibina dan diberdayakan	-	100 org	122.665.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100 org	122.665.000	
			17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah masyarakat perikanan yang sadar dan meningkatkan Pengetahuannya tentang hukum pendayagunaan sumberdaya laut		1.150 org	327.107.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1.150 org	327.107.000	
			17.02	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan penyuluhan	-	150 org	157.107.000	-	0	-	0	-	0	-	0	150 org	157.107.000	
			17.03	Peringatan Hari Nusantara	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari nusantara	-	1.000 org	170.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1.000 org	170.000.000	
			19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Jumlah masyarakat pesisir yang sadar dan peduli akan pelestarian budaya kelautan dan kemaritiman		300 org	97.110.000	-	0	-	0	-	0	-	0	300 org	97.110.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi								
							Target	Rp.	Target	Rp.									
			19.03	Pelestarian Tradisi dan Budaya Maritim	Jumlah masyarakat pesisir yang mengikuti kegiatan pelestarian tradisi dan budaya maritim	-	300 org	97.110.000	-	0	-	0	-	0	-	0	300 org	97.110.000	KAB. DELI SERDANG
			22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang memperoleh tambahan wawasan		40 org	204.442.000	-	0	-	0	-	0	-	0	40 org	204.442.000	
			22.04	Pekan Nasional (PENAS)	Jumlah pelaku usaha perikanan yang mengikuti Pekan Nasional (PENAS)	-	40 org	204.442.000	-	0	-	0	-	0	-	0	40 org	204.442.000	
			25	Program Pengembangan Masyarakat dalam Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pendayagunaan Sumberdaya Perikanan	Jumlah masyarakat yang peduli terhadap sumberdaya perikanan semakin meningkat		-	-	270 org	372.723.000	290 org	398.201.500	310 org	425.958.000	330 org	453.502.000	1.200 org	1.650.384.500	
			25.01	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumberdaya Perikanan	Jumlah anggota kelompok pokmaswas yang dibina dan diberdayakan	-	-	0	120 org	182.723.000	140 org	208.201.500	160 org	235.958.000	180 org	263.502.000	600 org	890.384.500	
			25.02	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya Perikanan	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan penyuluhan	-	-	0	150 org	190.000.000	600 org	760.000.000							
			26	Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat terhadap Budaya Kelautan dan Wawasan	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha perikanan yang sadar dan peduli akan pelestarian budaya		-	-	1.500 org	538.378.000	1.500 org	570.397.000	1.590 org	605.308.500	1.550 org	639.554.500	6.1400 org	2.353.638.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				Maritim	kelautan dan kemaritiman																
			26.01	Peringatan Hari Nusantara	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari nusantara	-	-	0	1.000 org	293.378.000	1.000 org	305.397.000	1050 org	213.000.000	1.050 org	339.554.500	4.100 org	1.151.329.500			
			26.02	Pelestarian Tradisi dan Budaya Maritim	Jumlah masyarakat pesisir yang mengikuti kegiatan pelestarian tradisi dan budaya maritim	-	-	0	500 org	245.000.000	500 org	265.000.000	500 org	218.308.500	500 org	300.000.000	2.000 org	1.028.308.500			
			26.03	Pekan Nasional (PENAS)	Jumlah pelaku usaha perikanan yang mengikuti Pekan Nasional (PENAS)	-	-	0	-	0	-	0	40 org	174.000.000	-	0	40 org	174.000.000			
Mewujudkan tata kelola Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				100%	1.426.367.500	100%	1.459.140.500	100%	1.531.920.000	100%	1.611.533.000	100%	1.688.465.500	100%	7.717.426.500	KAB. DELI SERDANG
			01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang tersedia	12 bln	160 buah	850.000	160 buah	850.000	160 buah	850.000	160 buah	850.000	160 buah	850.000	800 buah	4.250.000			
			01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet dan air	12 bln	2 jenis	17.100.000	2 jenis	19.000.000	2 jenis	21.000.000	2 jenis	23.000.000	2 jenis	25.000.000	10 jenis	105.100.000			
			01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah petugas pengelolaan keuangan	12 bln	156 OB	294.000.000	156 OB	96.290.500	168 OB	300.000.000	168 OB	310.000.000	168 OB	320.000.000	816 OB	1.520.290.500			
			01.08	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor	12 bln	91 OB	254.000.000	104 OB	260.000.000	91 OB	275.000.000	91 OB	284.000.000	91 OB	290.000.000	468 OB	1.363.000.000			
			01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	30 unit	42 unit	34.000.000	43 unit	36.000.000	45 unit	38.000.000	45 unit	40.000.000	45 unit	42.000.000	220 unit	190.000.000		KAB. DELI SERDANG	
			01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	33 jenis	30 jenis	24.000.000	32 jenis	26.000.000	34 jenis	28.000.000	36 jenis	34.000.000	36 jenis	29.000.000	168 jenis	141.000.000			
			01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan keperluan kantor	12 bln	7 jenis	24.000.000	8 jenis	22.000.000	8 jenis	24.000.000	9 jenis	26.000.000	9 jenis	30.000.000	41 jenis	126.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	12 bh	5 jenis	49.000.000	6 jenis	35.000.000	7 jenis	36.000.000	8 jenis	38.000.000	9 jenis	40.000.000	35 jenis	198.000.000	KAB. DELI SERDANG
			01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.080 expl	4.080 expl	21.000.000	4.080 expl	18.000.000	4.080 expl	19.000.000	4.080 expl	20.000.000	4.080 expl	21.000.000	20.400 expl	99.000.000	
			01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	12 bh	8.400 Org/kali	59.000.000	8.640 Org/kali	58.000.000	9.120 Org/kali	60.000.000	9.600 Org/kali	63.000.000	10.080 Org/kali	65.000.000	36.840 Org/kali	305.000.000	
			01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	469 OH	368 OH	454.000.000	500 OH	460.000.000	540 OH	465.000.000	580 OH	470.000.000	620 OH	490.615.500	2.608 OH	2.339.615.500	
			01.19	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah software yang dibutuhkan	1 paket	2 aplikasi	24.000.000	2 aplikasi	30.000.000	2 aplikasi	40.000.000	3 aplikasi	57.683.000	3 aplikasi	60.000.000	12 aplikasi	211.683.000	
			01.22	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan	13 unit	1 unit	19.417.500	3 unit	38.000.000	4 unit	50.070.000	4 unit	60.000.000	4 unit	65.000.000	16 unit	232.487.500	
			01.23	Penyediaan jasa publikasi perkantoran	Jumlah pameran yang dilaksanakan	2 pameran	5 pameran	152.000.000	5 pameran	160.000.000	5 pameran	175.000.000	5 pameran	185.000.000	5 pameran	210.000.000	25 pameran	882.000.000	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur berkondisi baik		100%	896.027.500	100%	916.614.500	100%	962.334.000	100%	1.012.346.000	100%	1.060.674.000	100%	4.847.996.000	
			02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	130.000.000	-	-	1 unit	160.000.000	-	-	1 unit	200.000.000	3 unit	490.000.000	
			02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibutuhkan	-	1 unit	233.477.500	1 unit	250.000.000	2 unit	120.000.000	1 unit	270.000.000	-	-	5 unit	873.477.500	
			02.09	Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan gedung /kantor yang dibutuhkan	21 unit	5 unit	30.000.000	7 unit	50.000.000	8 unit	50.000.000	9 unit	65.000.000	11 unit	75.000.000	40 unit	270.000.000	
			02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang dibutuhkan	131 Bh	1 jenis	60.000.000	6 jenis	72.000.000	8 jenis	75.000.000	10 jenis	90.000.000	10 jenis	97.674.000	35 jenis	394.674.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi								
							Target	Rp.	Target	Rp.									
			02.20	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Luas pemeliharaan rumah jabatan	-	200 m ²	26.600.000	200 m ²	28.000.000	200 m ²	28.000.000	200 m ²	30.000.000	-	-	800 m ²	112.600.000	
			02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang terpelihara	1.740 m ²	3.650 m ²	66.450.000	3.650 m ²	75.000.000	3.650 m ²	90.000.000	3.650 m ²	110.000.000	3.650 m ²	125.000.000	14.600 m ²	466.450.000	
			02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	12 bln	7 Unit	150.000.000	7 Unit	180.000.000	8 Unit	200.000.000	8 Unit	220.000.000	9 Unit	248.000.000	39 unit	998.000.000	
			02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatatan /perlengkapan kantor yang dipelihara	14 unit	37 unit	26.000.000	39 unit	27.000.000	41 unit	28.000.000	-	-	43 unit	29.000.000	160 unit	110.000.000	
			02.29	Pemeliharaan Berkala / Rutin Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang mendapat pemeliharaan	-	10 unit	3.500.000	10 unit	4.000.000	10 unit	4.500.000	14 unit	6.000.000	18 unit	8.000.000	62 unit	26.000.000	
			02.40	Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	-	-	-	1 unit	158.614.500	-	-	-	-	1 unit	200.000.000	2 unit	358.614.500	
			02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhab	2 unit	1 unit	110.000.000	-	-	1 unit	132.834.000	1 unit	145.346.000	-	-	3 unit	388.180.000	
			02.46	Rehabilitasi /Renovasi Taman	Luas Taman yang direhab /direnovasi	-	500 m ²	60.000.000	600 m ²	72.000.000	600 m ²	74.000.000	600 m ²	76.000.000	600 m ²	78.000.000	2.900 m ²	360.000.000	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur		100%	53.155.000	100%	54.376.000	100%	57.088.500	100%	60.055.000	100%	62.922.000	100%	287.596.500	
			03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan	36 stel	70 stel	53.155.000	70 stel	54.376.000	70 stel	57.088.500	70 stel	60.055.000	70 stel	62.922.000	350 stel	287.596.500	KAB. DELI SERDANG
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	06.	Program Peningkatan pengemb sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan yang terealisasi dengan tepat waktu		100%	198.378.000	100%	202.936.000	100%	213.058.000	100%	224.130.500	100%	234.830.500	100%	1.073.333.000	
			06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dikerjakan dan disusun	8 dok	8 dok	94.000.000	9 dok	96.000.000	9 dok	100.000.000	9 dok	70.000.000	9 dok	114.000.000	44 dok	474.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Lokasi								
							Target	Rp.	Target	Rp.									
			06.09	Forum OPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum OPD	200 org	-	-	-	-	-	-	200 org	74.130.500	-	-	200 org	74.130.500	
			06.28	Penyusunan Statistik Perikanan	Jumlah dokumen statistik perikanan yang disusun	10 expl	1 dok	104.378.000	1 dok	106.936.000	1 dok	113.058.000	1 dok	80.000.000	1 dok	120.830.500	5 dok	525.202.500	
J U M L A H								15.903.532.000		17.609.288.500		19.418.919.500		20.994.465.000		22.623.071.500		96.549.276.500	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang untuk periode 2019 – 2024 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang untuk periode 2019 – 2024 antara lain :

1. Jumlah Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.

Adapun target capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang untuk periode tahun 2019 – 2024 disajikan pada table berikut ini :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan	194.949,16 Ton	198.039,85 Ton	201.278,04 Ton	204.665,74 Ton	208.212,86 Ton	211.934,12 Ton	211.934,12 Ton
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin	81 Poin
3.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin	78 Poin

Tabel 14 (T-C.28). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 yang merupakan acuan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi instansi pemerintah yang akuntabel. Partisipasi seluruh komponen organisasi, instansi terkait dan stake holder dalam setiap langkah pelaksanaannya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan kelautan dan perikanan serta sebagai tolok ukur. Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, dalam penyusunannya sangat memerlukan integrasi antara keahlian Sumberdaya Manusia dan sumberdaya Kelautan dan Perikanan agar mampu memenuhi keinginan stake holder dan sekaligus dapat menjawab tantangan, tuntutan perkembangan strategis Daerah, Regional, Nasional dan Global.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang diakui masih jauh dari kesempurnaan, namun diharapkan dapat bermanfaat. Untuk itu, diharapkan masukan dan saran dari pembaca dan pengguna dokumen ini, sehingga mendapatkan kesempurnaan dalam penyajian buku ini.